



# Cakrawala

JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

**Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso)**

*Kampung KB for Community / Family Empowerment Efforts in East Java. (Study in Malang and Bondowoso)*

**Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin**

*Strengthening System Aspect : Developing of Community Empowerment Intitutions as an Effort to Alleviate the Poor People*

**Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014**

*(Studi Tentang Implementasi Otonomi Desadi Desa Paciran Kabupaten Lamongan)*

*Village Government After Law Number 6 Year 2014*

*(The Study of The Village Otonomy Implementation in Paciran Village, Lamongan Regency)*

**Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan**

**Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban**

*Economic Policy Based on Creative Industries Craft Supreme Effort Lifting Local Wisdom in District Tuban*

**Prospek Ekonomi Kebijakan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur untuk Pengembangan Porang dan Jamur Tiram di Jawa Timur**

*The Economic Prospect of Utilization of Idle Land Productivity for Cultivation of Porang and Oyster Mushroom in East Java*

**Pemanfaatan Social Media Sebagai Sarana Komunikasi Keluarga dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang pada Masyarakat di Surabaya**

*Social Media Utilization As A Family Communication Infrastructure to Minimize Deviant Behavior in Surabaya Society*

**Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal dalam Mendukung Pengelolaan Wisata di Wilayah Sekitar Gunung Bromo**

*Economic Prospects of Local Potential Development to Support Tourism Management in Bromo Mountain Area*

**Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) pada Balita Kurang Gizi di Kabupaten Tuban**

*Evaluation of Feeding's Programme to The Malnutrition Under Five Children in Tuban District*

**Diterbitkan Oleh :**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur**



# Cakrawala

JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

Diterbitkan oleh :  
Badan Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Jawa Timur

# Cakrawala

JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

Cakrawala merupakan media ilmiah (Jurnal) yang menginformasikan hasil penelitian dan pengembangan khususnya yang berupa *public policy research*. Materi tulisan meliputi empat bidang kajiannya itu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Sumber Daya alam dan Teknologi, serta Bidang Masyarakat. Redaksi menerima naskah berupa hasil Penelitian dan Pengembangan. Naskah yang dikirim harus asli dan belum pernah dipublikasikan pada jurnal lainnya.

## REDAKSI

### Pembina

Kepala Balitbang Prov. Jawa Timur

### Pengarah

Kepala Bidang Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan Balitbang Prov. Jawa Timur

### Penanggung Jawab

Kepala Sub. Bidang Desiminasi dan Pengembangan Hasil Penelitian Balitbang Prov. Jawa Timur

### Ketua Redaksi

Drs. Priyambodo, DESS.,MPM ; Manajemen Transportasi

### Penyunting Ahli

Prof. Dr. Ir. H. Achmadi Susilo, MS ; Pertanian (agro complex) , Biologi dan Lingkungan Hidup

DR. Ir. Rachmat Boedisantoso, MT ; Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Prof.Dr.V. RudyHandoko, MS ; Adm. Publik/ Kebijakan Publik

Dr. Akhmad Farid, S.Pi.MT; Pengelolaan SDA

### Penyunting Pelaksana

Eka Prabawati, SE, M.Si

Ari Setyanto, AP, M.Si

Slamet Hari Sutanto, S.Sos

Yudiyanto Tri K, ST, S.Mn

### Mitra Bestari

Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS ; Ilmu Politik (*Political Science*) dan Development Studies

Prof.Ir Daniel M. Rosyid, Ph.D ; Teknik Kelautan

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si ; Ilmu Sosial

Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS ; Manajemen Bisnis (Agribisnis)

### Staf Administrasi

Rahmawati, SH., M.Si

Sih pambudi, SE

Ni Made Rini Widayati, SE

M. Hendra Herdianto, SE

### Alamat Redaksi/ Penerbit :

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Telp. (031) 8295663 – Fax. (031) 8290719

Email : Litbang.jatimprov@gmail.com

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Cakrawala adalah jurnal kebijakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan, swasta, hasil-hasil penelitian, pengembangan, maupun kajian di bidang kebijakan dari para peneliti serta kalangan akademisi yang menyangkut kebijakan-kebijakan disegala bidang yang dibutuhkan oleh Pemerintah, pemerintah daerahmaupun stakeholder dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Jurnal Cakrawala saat ini memasuki publikasi Volume 11 nomor 2 bulan Desember 2017 dengan menyajikan delapan (8) tulisan, yaitu pertama sebuah tulisan yang ditulis oleh *Mardiyono* dengan judul "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur - sebuah Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso". Tulisan ini mengupas hal-hal yang terkait dengan keberhasilan program Kampung KB di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso.

*Erna Setijaniningrum* menulis tentang "Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin", yang bertujuan mengetahui faktor - faktor yang menghambat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengembangan LPMD dari aspek sistem sebagai upaya penguatan fungsi LPMD dalam rangka pengentasan kemiskinan.. Selanjutnya *Umar Sholahudin dan kawan-kawan* menulis tentang "Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 - suatu Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan".

Kemudian *M. Amir, HT* dalam penelitiannya mengangkat topik "Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban", mengupas tentang potensi lokal yang digagas oleh orang-orang kreatif dalam memanfaatkan kreatifitas dalam memajukan kearifan lokal Kabupaten Tuban.

*Agung Wahyono dan kawan-kawan* menganalisis tentang lahan tidur yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam tulisannya yang berjudul "Prospek Ekonomi Kebijakan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur Untuk Pengembangan Porang Dan Jamur Tiram Di Jawa Timur"

Sementara masih banyaknya permasalahan terkait dengan pemanfaatan Sosial Media Sebagai Sarana Komunikasi Keluarga Dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat dirangkum dalam tulisan *Tira Fitriawardhani* dengan judul "Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Sarana Komunikasi Keluarga Dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang Pada Masyarakat Di Surabaya".

*Puji Wahono dan kawan-kawan* dalam tulisannya berjudul "Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal Dalam Mendukung Pengelolaan Wisata Di Wilayah Sekitar Gunung Bromo", menguraikan tentang model pengembangan wisata di wilayah sekitar Taman Nasional Gunung Bromo yang meliputi Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.

Dan yang terakhir adalah *Elya Sugianti* menganalisis tentang evaluasi pelaksanaan program PMT-P berdasarkan segi input, proses dan output di Kabupaten Tuban. Melalui tulisannya yang berjudul "Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Kurang Gizi Di Kabupaten Tuban".

Selamat membaca

Redaksi

# Cakrawala

JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

## DAFTAR ISI

### Mardiyono

- Kampung KB sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur. (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso)  
*Kampung KB for Community / Family Empowerment Efforts in East Java. (Study in Malang and Bondowoso)* ..... 129 - 136

### Erna Setijaningrum

- Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin  
*Strengthening System Aspect : Developing of Community Empowerment Intitutions as an Effort to Alleviate the Poor People* ..... 137 - 144

### Umar Sholahudin<sup>1</sup>, M. Hari Wahyudi<sup>2</sup>, Achmad Hariri<sup>3</sup>

- Pemerintah Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desadi Desa Paciran Kabupaten Lamongan)  
*Village Government After Law Number 6 Year 2014 (The Study of The Village Otonomy Implementation in Paciran Village, Lamongan Regency)*..... 145 - 155

### M. Amir. HT

- Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan Dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban  
*Economic Policy Based on Creative Industries Craft Supreme Effort Lifting Local Wisdom in District Tuban* ..... 157 - 169

### Agung Wahyono<sup>1</sup>, Aji Seto Arifianto<sup>2</sup>, Nanang Dwi Wahyono<sup>3</sup>, Hendra Yufit Riskiawan<sup>4</sup>

- Prospek Ekonomi Kebijakan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur untuk Pengembangan Porang dan Jamur Tiram di Jawa Timur  
*The Economic Prospect of Utilization of Idle Land Productivity for Cultivation of Porang and Oyster Mushroom in East Java* ..... 171 - 180

### Tira Fitriawardhani

- Pemanfaatan Social Media Sebagai Sarana Komunikasi Keluarga dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang pada Masyarakat di Surabaya  
*Social Media Utilization As A Family Communication Infrastructure to Minimize Deviant Behavior in Surabaya Society* ..... 181 - 194

### Puji Wahono<sup>1</sup>, Hari Karyadi<sup>2</sup>, Suhartono<sup>3</sup>, Aryo Prakoso<sup>4</sup>, Rebecha Prananta<sup>5</sup>, Prameshi Lokaprasida<sup>6</sup>

- Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal dalam Mendukung Pengelolaan Wisata di Wilayah Sekitar Gunung Bromo  
*Economic Prospects of Local Potential Development to Support Tourism Management in Bromo Mountain Area* ..... 195 - 216

### Elya Sugianti

- Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) pada Balita Kurang Gizi di Kabupaten Tuban  
*Evaluation of Feeding's Programme to The Malnutrition Under Five Children in Tuban District* ..... 217 - 224

Lembar abstrak boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

<p>DDC 363.96 Mar.k  <b>Mardiyono</b>                  Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur</p> <p>Kampung KB sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur. (<i>Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso</i>)</p>	<p><i>advokasi, KIE dan penggerakan di wilayah kampung KB.</i></p> <p>(Penulis)</p> <p><b>Kata kunci :</b> Kampung KB, Pemberdayaan Keluarga</p>
<p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol.11 No.2 Desember 2017: Hal.129-136</p> <p><i>Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat/keluarga di wilayah pinggiran terhadap pengelolaan program KB atau program lainnya yang sesuai dengan permasalahan di wilayah tersebut. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri, sebagai tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri agar bisa lebih mandiri dalam pengelolaan program. Dengan metode pendekatan penelitian kualitatif dilakukan studi dengan menerapkan tahapan penelitian operasional dalam rangka untuk mengevaluasi intervensi keberhasilan program Kampung KB di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK dan program terkait lainnya guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Adapun hasil penelitian adalah keberhasilan kampung KB sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat diberbagai tingkatan, perlu intervensi program, dana, sarana, prasarana, KIE, advokasi dan penggerakan dari SKPDKB dan lintas sektor dengan target akhir gerakan budaya secara kolektif dan berkesinambungan, maka kampung KB bisa dianggap sebagai prakarsa masyarakat itu sendiri bukan semata program pemerintah. Peran Bupati/Walikota sangat penting bersama Tim Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota dengan melibatkan anggota DPRD duduk bersama mengagendakan program intervensi di kampung KB sekaligus untuk menjaga kesinambungan program. Diperlukan pendampingan pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan dan pelatihan "Skill" pada kelompok UPPKS dan Poktan lainnya serta penyediaan dana APBD dalam mendukung</i></p>	<p>DDC 362.5 Ern.p  <b>Erna Setijanigrum</b>                  Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya</p> <p>Penguatan Aspek Sistem : Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Pengentasan Penduduk Rentan Miskin</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol.11 No.2 Desember 2017: Hal.137-144</p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengembangan LPMD dari aspek sistem sebagai upaya penguatan fungsi LPMD dalam rangka pengentasan kemiskinan. Latar belakang penelitian ini karena kurangnya peran LPMD dalam kegiatan pembangunan di desa. Peran LPMD dalam pembangunan pedesaan diperlukan mengingat masih tingginya jumlah penduduk rentan miskin di Jawa Timur sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi yang tinggi, dan merosotnya nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pengembangan kapasitas kelembagaan dari Riyadi Soeprapto (2010) yang salah satunya adalah aspek sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMD tidak optimal menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan desa dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin karena masih memiliki hambatan dari sistem berupa kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD dan tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dari aspek sistem melalui komitmen kepala desa</i></p>

<p>dan dibuatnya regulasi khusus secara tegas dan jelas mengenai LPMD.</p> <p>(Penulis)</p> <p><b>Kata Kunci :</b> Pengembangan sistem, LPMD, pengentasan penduduk rentan miskin</p>	<p>dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sudah lebih berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu pembangunan desa juga melibatkan peran serta masyarakat desa, sehingga pembangunan mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa.</p> <p>(Penulis)</p> <p><b>Kata Kunci ;</b> Implementasi, Pemerintahan Desa, UUNo. 6 Tahun 2014</p>
<p>DDC 342.04 Uma.p  <b>Umar Sholahudin, M. Hari Wahyudi, dan Achmad Hariri</b>                  Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya</p> <p>Pemerintah Desa Pasca UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desadi Desa Paciran Kabupaten Lamongan)</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 145-155</p> <p>untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa Desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dhormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 18. Bagaimana desa menjalankan kewenangan dan otonominya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari fakta dan data di lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui studi lapangan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dan masyarakat desa. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa dapat berjalan relatif baik. Hhal ini ditunjukkan</p>	<p>DDC 338.9 Ami.k  <b>M. Amir. HT</b>                  Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 157-169</p> <p>Tujuan Kajian ini untuk mengetahui tata kelola ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tuban, kemudian mengetahui kapasitas dan SDM kreatif yang harus dikembangkan Lembaga Pendidikan, dan mencari solusi dari kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, merumuskan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/industri kreatif baik secara fenensial maupun non-fenensial, mengevaluasi lamban-nya akselerasi tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi terkait pengembangan ekonomi/ industri kreatif. Hasil yang diharapkan menemukan tata kelola ekonomi kreatif yang sesuai karakterestik kabupaten Tuban, konsep kapasitas dan SDM yang kreatif yang harus dikembangkan Lembaga Pendidikan, solusi dari kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, dan menemukan rumusan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/ industri kreatif, serta menemukan rekomendasi terhadap lamban-nya akselerasi tumbuhnya TIK yang terkait pengembangan ekonomi/ industri kreatif. Ruang Lingkup, membahas tata kelola ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban, memilah kapasitas dan kualitas</p>

<p>SDM kreatif, sebagai pengembangan ekonomi/ industri kreatif di Kabupaten Tuban, memperbaiki kelemahan tata kelola dan pengembangan ekonomi/ industri kreatif, meniadakan rumusan kebijakan penghargaan bagi para pelaku ekonomi/ industri kreatif, dan menerapkan rekomendasi terhadap lamban-nya akselerasi tumbuhnya TIK yang terkait pengembangan ekonomi/industri kreatif.</p> <p>(Penulis)</p> <p><b>Kata kunci:</b> Ekonomi Kreatif, Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>untuk pengembangan budidaya Porang dan Jamur Tiram dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek budidaya, pascapanen, permodalan, dan pemasaran.</p> <p>(Penulis)</p> <p><b>Kata kunci:</b> budidaya, jamur tiram, lahan tidur, porang.</p>
<p>DDC 658.83 Agu.p  <b>Agung Wahyono<sup>1</sup>, Aji Seto Arifianto<sup>2</sup>, Nanang Dwi Wahyono<sup>3</sup>, Hendra Yufit Riskiawan<sup>4</sup></b>                  Politeknik Negeri Jember</p> <p>Prospek Ekonomi Kebijakan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur untuk Pengembangan Porang dan Jamur Tiram di Jawa Timur</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 171-180</p> <p>Upaya peningkatan produksi pertanian melalui ekstensifikasi pertanian bisa dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur. Meskipun secara umum potensi lahan tidur cukup besar, sampai saat ini belum ada informasi akurat mengenai potensi lahan tidur yang ada di kabupaten Ngawi, Madiun dan Nganjuk. Tujuan penelitian adalah untuk: 1) Mengidentifikasi potensi lahan tidur di Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Nganjuk untuk budidaya Porang dan Jamur Tiram, 2) Menganalisis usaha tani dan nilai tambah budidaya Porang dan Jamur Tiram, dan 3) Menentukan model pengusahaan dan strategi pengembangan budidaya Porang dan Jamur Tiram pada lahan tidur di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Area lahan tidur di Kabupaten Madiun dan Nganjuk sangat sesuai untuk budidaya Porang dan Jamur Tiram. Sedangkan di Kabupaten Ngawi perlu pemilihan lokasi yang cermat khususnya untuk budidaya porang, 2) Usaha tani Porang dan Jamur tiram sangat menguntungkan secara ekonomi. Nilai tambah akan semakin tinggi dengan melakukan pengolahan Porang dan Jamur Tiram menjadi berbagai jenis produk olahan, 3) Strategi</p>	<p>DDC 006.754 Tir.p  <b>Tira Fitriawardhani, S.Sos, M.Si</b>                  Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara</p> <p>Pemanfaatan Social Media sebagai Sarana Komunikasi Keluarga dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Menyimpang pada Masyarakat di Surabaya</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA"                  Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 181-194</p> <p>Munculnya perilaku menyimpang yang terjadi akhir-akhir ini, sangat memprihatinkan sekali. Jenis perilaku menyimpang adalah luas, misalnya berkelahi, perjudian, pencurian, mencium dan memeluk pasangannya, membaca buku-buku yang berbau porno, menonton VCD porno, gratis seks, mengisap dan membeli dan menjual obat-obatan, minum, pemerkosaan dan tindakan tercela yang membunuh. Perilaku menyimpang ini tidak hanya dapat terjadi pada orang tua dan remaja, tetapi juga sudah mulai merangkak pada anak-anak di bawah umur. Keluarga adalah pertama dan terutama sebagai media pendidikan dan perlindungan anggota keluarga di dalamnya. Suami, istri dan anak-anak harus dapat membangun komunikasi diantara mereka dan juga untuk melakukan dengan interaksi di luar keluarga untuk menciptakan kondisi yang transparan dan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dengan satu sama lain. Tujuan umum dari studi ini adalah untuk menentukan apakah media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi keluarga dalam meminimalkan perilaku menyimpang dalam masyarakat di Surabaya. Subyek studi terdiri dari 50 Nara sumber adalah 25 orang dan 25 orang tua. Laki-laki dan gadis remaja diambil ke dalam sampel remaja berusia antara 11-25 tahun. Sampel diambil melalui stratified random sampling teknik</p>



*Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang deskriptif dengan data Analisis kualitatif. Instrumen penyaringan data yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah dalam bentuk penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi keluarga dalam upaya untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku menyimpang dalam masyarakat di kota Surabaya.*

(Penulis)

**Kata kunci:** Media sosial, komunikasi Keluarga, perilaku menyimpang.

DDC 338.93 Puj.p

**Puji Wahono, Hari Karyadi, Suhartono, Aryo Prakoso, Rebecha Prananta, Prameshi Lokaprasida\***

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prospek Ekonomi Pengembangan Potensi Lokal dalam Mendukung Pengelolaan Wisata di Wilayah Sekitar Gunung Bromo

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 195- 216

*Penelitian ini mengidentifikasi potensi lokal dan menyusun model pengembangan wisata di wilayah sekitar Taman Nasional Gunung Bromo yang meliputi Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Teridentifikasi bahwa potensi keempat kabupaten di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Bromo tersebut memiliki potensi alam yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata untuk mendukung destinasi wisata Gunung Bromo. Potensi tersebut antara lain berupa desa wisata, air terjun, pemandangan alam berupa gunung, dan danau. Terhadap potensi destinasi wisata yang ada, secara ekonomi keempat kabupaten tersebut akan lebih mendapatkan manfaat apabila sumber daya yang dimiliki digunakan untuk memperbaiki kualitas manajemen, harga, ketersediaan informasi, dan kesediaan masyarakat untuk membayar. Adapun strategi yang berbasis masyarakat akan lebih tepat untuk pengembangan destinasi wisata di sekitar kawasan Bromo tersebut. Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten sekitar kawasan Taman Nasional*

*Gunung Bromo yakni Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran kualitatif dan kuantitatif.*

(Penulis)

**Kata Kunci:** Gunung Bromo, Potensi lokal, Destinai pariwisata, Strategi berbasis masyarakat.

DDC 612.3 Ely.e

**Elya Sugianti**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Pada Balita Kurang Gizi di Kabupaten Tuban

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 Desember 2017: Hal. 217- 224

*Program PMT-P adalah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah dalam penanganan masalah gizi pada balita kurang gizi khususnya pada keluarga miskin. Namun, selama ini masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program PMT-P berdasarkan segi input, proses dan output di Kabupaten Tuban. Informan dalam penelitian ini adalah kasi gizi dinas kesehatan, kepala puskesmas, tenaga pelaksana gizi, bidan desa, dan kader. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dai segi input, SDM dan bahan PMT-P sudah memadai, namun petunjuk pelaksanaan, sarana prasarana, dan pendanaan masih kurang, dari segi proses, penyimpanan, pengangkutan dan pemantauan masih kurang, dari segi output, ketepatan umur sudah sesuai dan ada keefektifan program dalam kenaikan berat badan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah program PMT-P sudah efektif dalam meningkatkan berat badan balita sasaran walaupun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program.*

(Penulis)

**Kata kunci :** kurang gizi, keluarga miskin, program PMT-P, evaluasi

The abstract sheet may reproduced without permission or charger

DDC 363.96 Mar.k

**Mardiyono**

Peneliti Madya Perwakilan BKKBN Jawa Timur

Kampung KB For Community / Family Empowerment Efforts in East Java. (Study in Malang and Bondowoso)

J.L.Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 December 2017: Page.129-136

*Kampung KB is designed as an effort to empower the community / family in the periphery to the management of family planning programs or other programs that are appropriate to the problems in the region. Its activities are managed on the basis of the principle of, by, and for society itself, as the ultimate goal of course the development of society itself. The government only stimulates and mentoring, the rest is the responsibility of the community itself to be more independent in the management of the program. With qualitative research approach method, the study is conducted by applying the operational research stages in order to evaluate the intervention of the success of Kampung KB program in Malang and Bondowoso. The purpose of this research is to improve the achievement of KKBPK program and other related programs in order to create quality small family. The results of the research is the success of the village is determined by the active role of the community in various levels, the need for program intervention, funds, facilities, infrastructure, IEC, advocacy and mobilization of SKPDKB and cross-sector with the target of collective and sustainable cultural movement, regarded as community initiative itself is not merely a government program. The role of the Regent / Mayor is very important with the Pokja Kampung KB Kabupaten/Kota team by involving the DPRD members sitting together to schedule the intervention program in the village of KB as well as to maintain the continuity of the program. Required assistance for KKBPK program implementation in field line and "Skill" training in other UPPKS and Poktan groups as well as provision of APBD funds in support of advocacy, IEC and mobilization in the kampong area of KB.*

(Author)

**Keywords:** Kampung KB, Family Empowerment

DDC 362.5 Ern.p

**Erna Setijaningrum**

Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya

Strengthening System Aspect Developing of Community Empowerment Intitutions as an Effort to Alleviate The Poor People

J.L.Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 December 2017: Page.137-144

*This study aims to determine the factors that inhibit the function of Village Community Empowerment Institution (LPMD) and LPMD development from the aspect of the system as an effort to strengthen the function of LPMD in the framework of poverty alleviation. The background of this research is due to the lack of LPMD role in village development activities. The role of LPMD in rural development is still needed due to the high number of poor vulnerable population in East Java as a result of rising fuel prices, high inflation, and the declining rupiah exchange rate. This research uses qualitative method. The theory used is institutional capacity building theory from Riyadi Soeprapto (2010) which one of them is system aspect. The results of this study indicate that LPMD does not optimally perform its function as a driver of village development in the effort to alleviate poor vulnerable population because it still has barriers from the system. The obstacle is the lack of commitment of the village head to implement the rules firmly as the legal basis of the LPMD organization and there is no specific regulation on LPMD position, function, duty, authority and honorarium. Therefore it is necessary to develop from the aspect of the system through the commitment of the village head and the establishment of specific regulations expressly and clearly on LPMD.*

(Author)

**Keywords:** Development of system, LPMD, vulnerability of poor vulnerable population

<p>DDC 342.04 Uma.p <b>Umar Sholahudin, M. Hari Wahyudi, dan Achmad Hariri</b> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya</p> <p>Village Government After Law Number 6 Year 2014 (The Study of The Village Otonomy Implementation in Paciran Village, Lamongan Regency)</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA" Vol. 11 No.2 December 2017: Page. 145 - 155</p>	<p><i>implementation, the community has an active role to supervise and evaluate village development.</i></p> <p>(Author)</p> <p><b>Keywords:</b> Evaluation, Village Government, Law No. 6 Of 2014</p>
<p><i>Village as contained in Law No. 6 of 2014 on village constitutes a union of legal communities with territorial borders authorized to regulate and administer government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origins, and / or traditional rights recognized and respected in the system of the Unitary State government of Republic Indonesia. Law No. 6 of 2014 grants considerable authority to villages in administering village government households, this is confirmed in subsection 18 covering authority in the field of village government, village development, village community development, and village community empowerment based on community initiatives, origins, and village customs. This should be coupled with the village's ability to manage and carry good village government in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014. This study used an analytical descriptive that described and analyzed the data obtained. The collecting data was done with or through direct study on village government management in Paciran village, Lamongan regency. In addition, the data was also done through in-depth interviews which conducted to obtain information about the implementation of Law No. 6 of 2014 against the village apparatus and village communities. The results of this research was the management of the village government in Paciran village, Lamongan regency in the context of governance based on village autonomy can run relatively well, this was indicated by the policy of village financial management that has been more focused on rural development that was infrastructure development, community empowerment and government. In addition, village development also involved the participation of village communities, so that the development started planning and</i></p>	<p>DDC 338.9 Ami.k <b>M. Amir. HT</b> Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Economic Policy Based on Creative Industries Craft Supreme Effort Lifting Local Wisdom in Distrik Tuban</p> <p>J.L Kebijakan "CAKRAWALA" Vol. 11 No.2 December 2017: Page. 157 - 169</p> <p><i>Objective This study to determine the economic governance creative in Tuban, then determine the capacity and human creative should be developed Institutions, and find solutions to the weaknesses of governance and economic development / creative industries, formulate policies awards for economic actors / industry fenensial both creative and non-fenensial, evaluate its sluggish acceleration of the growth of information and communication technology-related economic development / creative industry. Results are expected to find economic governance creative suite karakteristik district of Tuban, the concept of capacity and human resources creative to be developed Institution, a solution of the weakness of governance and economic development / creative industries, and found the formulation of policies awards for economic actors / creative industries and found the recommendations to slow his accelerated growth of ICT-related economic development / creative industry. Scope, discussing economic governance creative in Tuban, sorting capacity and quality of human resources creatively, as an economic development / creative industries in Tuban, improve weaknesses in governance and economic development / creative industry, follow up that policy formulation award for economic actors / industry creative, and implement its recommendations on sluggish growth of ICT related ekselerasi economic development / creative industry.</i></p> <p>(Author)</p> <p><b>Keywords:</b> Creative Economy, Regional Superior Products.</p>

DDC 658.83 Agu.p  
Agung Wahyono<sup>1</sup>, Aji Seto  
Arifianto<sup>2</sup>, Nanang Dwi Wahyono<sup>3</sup>, Hendra  
Yufit Riskiawan<sup>4</sup>  
Politeknik Negeri Jember

The Economic Prospect of Utilization of Idle  
Land Productivity for Cultivation of Porang  
and Oyster Mushroom in East Java

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"  
Vol. 11 No.2 December 2017: Page. 171 - 180

*Efforts to increase agricultural production by agricultural extension can be done through the utilization of idle land. Despite the utilization of idle land is potential, there is no accurate information on the potential of the idle land in Ngawi, Madiun and Nganjuk. The objective of this study was to: 1) identify the potential of idle land in Ngawi, Madiun, and Nganjuk District for cultivation of Porang and Oyster Mushroom, 2) analyze the farming business and added value of Porang and Oyster Mushroom, and 3) establish the farming model and strategy for development of Porang and Oyster Mushroom business in the research region. Based on the research data, it can be concluded that: 1) the idle land in Madiun and Nganjuk District is highly suitable for cultivating of Porang and Oyster Mushroom. On the contrary, in Ngawi district, the land used for cultivating of Porang should be selected carefully, 2) The farming business of Porang and Oyster Mushroom is highly profitable. The added value of Porang and oyster Mushroom is increase after processing them into various processed products, 3) the strategy for development of Porang and Oyster Mushroom farming can be done by considering several factors such as; cultivation technology, postharvest, capital, and marketing.*

(Author)

**Keywords:** farming, oyster mushrooms, idle land, porang.

DDC 006.754 Tir.p  
Tira Fitriawardhani, S.Sos, M.Si  
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Ubhara  
Surabaya

Social Media Utilization as a Family  
Communication Infrastructure to Minimize  
Deviant Behavior in Surabaya Society

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"  
Vol. 11 No.2 December 2017: Page. 181 - 194

*The rise of deviant behavior occurring lately, make any necessary increase confuse. Type of deviant behavior is rife, for example fighting, gambling, stealing, kiss and hug her partner, read books obscene, pornographic VCDs watch, free sex, sucking and buy and sell drugs, drinking, raping and reprehensible acts that kill. This deviant behavior not only can happen to parents and adolescents, but also has begun to crawl on children under age. Family is first and foremost as a medium of education and the protection of family members in it. Husband, wife, and children should be able to communicate their behavioral development and also to do with the interaction outside the family in order to create a condition that is transparent and easier to do surveillance with each other.*

*The general objective of this study was to determine whether social media can be used as a means of family communication in minimizing deviant behavior in society in Surabaya. Subyek study consisted of 50 resource persons is 25 speakers and 25 speakers parents. Boys and girl teenagers were taken into the sample are teenagers aged between 11-25 years ols. Sampel taken through stratified random sampling technique Sampling. Methode used in this research is descriptive method with data analysis kualitatif. Instrumen filtering the data used were observation and depth interviews. Expected results of this study are in the form of utilization of social media as a means of family communication in an effort to reduce or eliminate deviant behavior in society in Surabaya City.*

(Author)

**Keywords:** Social Media, Communications Family, Deviant Behavior.

DDC 338.93 Puj.p

**Puji Wahono, Hari Karyadi, Suhartono, Aryo Prakoso, Rebecha Prananta, Prameshi Lokaprasida\***

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)

Economic Prospects of Local Potential Development to Support Tourism Management in Bromo Mountain Area

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 Desember 2017: Page. 195 - 216

This research investigates the potential of local tourism destinations and develops a model of tourism development in the area around Gunung Bromo National Park covering Malang, Pasuruan, Probolinggo and Lumajang districts. It was identified that the potential of the four districts in the vicinity of Mount Bromo National Park has great natural potential to be developed into tourist destinations to support the tourist destinations of Mount Bromo. These potentials include tourism villages, waterfalls, natural scenery of mountains, and lakes. Against the potential of existing tourist destinations, economically those four districts will benefit more if their resources are used to improve the quality of management, price, availability of information, and the willingness of the community to pay. The community-based strategy would be more appropriate for the development of tourist destinations around the area of Bromo. This research was conducted in four regencies around the area of Gunung Bromo National Park, Malang Regency, Pasuruan, Probolinggo, and Lumajang. The research method used is a mixture of qualitative and quantitative.

(Author)

**Keywords:** Mount Bromo, Potential of local tourism, Destinai tourism, Community based strategy.

DDC 612.3 Ely.e

**Elya Sugianti**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Evaluation of Feeding's Programme to the Malnutrition Under Five Children in Tuban District

J.L Kebijakan "CAKRAWALA"

Vol. 11 No.2 Desember 2017: Page. 217 - 224

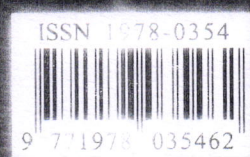
Feeding's programme is one of the government's programs in handling nutritional problems for under-five children especially in poor families. However, there are many obstacles in the implementation. The purpose of this research is to evaluate of feeding's programme based on input, process and output in Tuban district. The informant of this research are head section of health departement, head of public health center, nutritionist, midwives, and cadres. Data analysis were used descriptive analysis. The results showed that based on input, human resources and materials feeding's programme is adequate, but the guidance of implementation, infrastructure, and funding is still lacking, based on process, storage, transportation and monitoring is still lacking, based on output, accuracy of age is appropriate and feeding's programme effective to weight gain malnutrition under five children. The conclusion of this research is feeding's programme has been effective in increasing weight of target under five malnutrition children although there are still obstacles in program implementation.

(Author)

**Keywords :** malnutrition, poor family, feeding's programme, evaluation

## PEDOMAN BAGI PENULIS DALAM JURNAL LITBANG KEBIJAKAN “CAKRAWALA”

1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Judul dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diketik dengan huruf kapital tebal bold pada halaman pertama maksimal 25 kata. Judul mencerminkan isi tulisan.
3. Jurnal Litbang Kebijakan “Cakrawala” menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian *research paper* dan kajian pemikiran opini dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Naskah harus asli dan belum pernah diterbitkan.
4. Naskah harus merupakan tulisan ilmiah yang bertutur-tunggal dengan bidang kebijakan publik.
5. Identitas penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis diketik dibawah judul, nama penulis, nama lembaga asal, alamat lembaga asal, dan alamat email penulis.
6. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Inggris diketik dengan huruf miring italic, berarak 1 spasi, memuat ringkasan lengkap isi tulisan, maksimum 250 kata, dilengkapi dengan kata kunci 3-5 kata.
7. Sistematisasi penulisan dibuat urut, untuk hasil penelitian ilmiah dan judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian (jenis, waktu penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka minimal 10 rujukan). Untuk kajian pemikiran opini mulai dari judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka minimal 25 rujukan. Naskah terbagi menjadi Bab dan Sub bab dengan penomoran Judul Bab tanpa nomor, A. Sub bab tingkat pertama, 1. Subbab tingkat kedua, a. Subbab tingkat ketiga, 1. Subbab tingkat keempat dan seterusnya dengan posisi rapat kiri.
8. Pengutipan
  - a. Bila seorang (Philips, 2014).
  - b. Bila seorang (Philips & Sekarlati, 2014).
  - c. Bila seorang atau lebih (Philips, et al, 2014).
9. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan Alpaider. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka meliputi : (1) nama akhir pengarang, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademis; (2) tahun terbitan; (3) judul lengkap sub judul; (4) tempat penerbitan; (5) nama penerbit.
  - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal, seperti contoh:  
Yoceli Dilla, 2013. *Demokrasi dan Sumbu Seta Legatus: Analisis Oke di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Litbang Kebijakan “Cakrawala” 7(2): 46-47.
  - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh:  
Sudarsman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
  - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh:  
*Analisis dan Kelembutan Instrumen Penelitian*, Anonim, Darmasari, Jakarta: LPRES, Hal. 102-146.
  - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam proceeding, seperti contoh:  
*Proceeding Tema Ilmiah Penelitian*, Hotel Selesta Kuta Bali, 14-25 April 2013. Pengembangan Sumberdaya Kawasan Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.
  - e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti contoh:  
Irwanto, 2013. *Pengembangan Wisata Bahari Jawa Timur Berbasis Komunitas*. Teropong, Edisi 71, Hal. 36-40.
  - f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh:  
Harwa, H. 2005. Realitas dan pencaindra Anda. <http://www.pesaharuyahya.com> dan [info@haruyahya.com](mailto:info@haruyahya.com). 27 Januari 2008: 14-35.
  - g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga instansi, seperti contoh:  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. *Pauman: Kerjasama Melalui Umah*. Jakarta : Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Penelitian Peneliti.
  - h. Bila pustaka yang dirujuk berupa artikel dari majalah atau surat kabar seperti contoh:  
Margawatiwa, Y. B. 1992. *Pemaduan Manusia Merdeka*. Majalah Kompas 11 Agustus. Halaman 15. Jakarta.
  - i. Bila pustaka yang dirujuk berupa berita dari majalah atau surat kabar seperti contoh:  
Koran Tempo. 2002. *Belajar dari Sumbu Entri*. 5 Februari. Halaman 21. Jakarta.
  - j. Majalah Tempo. 2002. *Jumlahnya Entri*. No. XXXVIII. 25 Januari. Halaman 18. Jakarta.
  - k. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah yang belum diterbitkan, seperti contoh:  
Bagas, P. *Pengembangan Jasa-Jasa Tenaga Kerja Indonesia*. Workshop Surabaya, 22-24 April 2008.
  - l. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi, tesis, disertasi, seperti contoh:  
Yoceli Dilla, 2013. *Analisis Legatus dan Kelembutan Finansial Operasional Angkatan Oke di Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi: Fakultas Teknik, Institut Teknologi 11 Nopember Surabaya.
  - m. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh:  
Nawati, Diah, Husein, Achmad & Rahardjo. 2010. *Penelitian Persepsi Nilai Ekonomi Lampung Lampung*. Laporan Penelitian, Balitbang Provinsi Jawa Timur.
  - n. Bila pustaka yang dirujuk berupa peraturan dan perundang-undangan ditulis dan diletakkan pada bagian akhir daftar pustaka diawali dengan titik-titik, seperti contoh:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.  
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
  - o. Bila pustaka yang dirujuk berupa sumber dari internet atau blog ditulis dan diletakkan paling akhir dibawah daftar pustaka setelah rujukan peraturan perundang-undangan diawali dengan titik-titik, seperti contoh:  
<https://blog.ruman.com/1256/milad-8-kenya-are-tercepat-di-dunia.html>  
<http://www.daracn.com/indonesia/2013/karena-apa.html>.
10. Kelengkapan tulisan meliputi: Tabel, grafik, dan sebagainya dan dibuat dalam format yang dapat diedit.
11. Format tulisan: 15-20 halaman yang diketik dengan menggunakan MS Word sudah termasuk dalam pustaka pada lembar ke-1 dengan font Times New Roman 11, spasi single. Batas atas dan bawah 2 cm, tepi kiri 3 cm, dan tepi kanan 2 cm.
12. Redaksi editor bertanggung jawab atas kesesuaian naskah dengan format Jurnal Litbang Kebijakan “Cakrawala”.



**Alamat Redaksi :**  
Balitbang Provinsi Jawa Timur  
Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya  
Telp. (031) 8295663 - Fax. (031) 8290719, E-mail : Litbang.jatimprov@gmail.com

**PENGUATAN ASPEK SISTEM :  
PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN PENDUDUK RENTAN MISKIN**

**STRENGTHENING SYSTEM ASPECT : DEVELOPING OF COMMUNITY  
EMPOWERMENT INSTITUTIONS AS AN EFFORT TO ALLEVIATE THE POOR  
PEOPLE**

**Erna Setijanigrum**

Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Airlangga, Surabaya  
Email: erna\_set@yahoo.com

Diterima : 20 Juli 2017; direvisi : 22 November 2017 ; disetujui : 30 November 2017

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengembangan LPMD dari aspek sistem sebagai upaya penguatan fungsi LPMD dalam rangka pengentasan kemiskinan. Latar belakang penelitian ini karena kurangnya peran LPMD dalam kegiatan pembangunan di desa. Peran LPMD dalam pembangunan pedesaan diperlukan mengingat masih tingginya jumlah penduduk rentan miskin di Jawa Timur sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi yang tinggi, dan merosotnya nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pengembangan kapasitas kelembagaan dari Riyadi Soeprapto (2010) yang salah satunya adalah aspek sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMD tidak optimal menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan desa dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin karena masih memiliki hambatan dari sistem berupa kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD dan tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dari aspek sistem melalui komitmen kepala desa dan dibuatnya regulasi khusus secara tegas dan jelas mengenai LPMD.

**Kata Kunci:** Pengembangan sistem, LPMD, pengentasan penduduk rentan miskin

**ABSTRACT**

This study aims to determine the factors that inhibit the function of Village Community Empowerment Institution (LPMD) and LPMD development from the aspect of the system as an effort to strengthen the function of LPMD in the framework of poverty alleviation. The background of this research is due to the lack of LPMD role in village development activities. The role of LPMD in rural development is still needed due to the high number of poor vulnerable population in East Java as a result of rising fuel prices, high inflation, and the declining rupiah exchange rate. This research uses qualitative method. The theory used is institutional capacity building theory from Riyadi Soeprapto (2010) which one of them is system aspect. The results of this study indicate that LPMD does not optimally perform its function as a driver of village development in the effort to alleviate poor vulnerable population because it still has barriers from the system. The obstacle is the lack of commitment of the village head to implement the rules firmly as the legal basis of the LPMD organization and there is no specific regulation on LPMD position, function, duty, authority and honorarium. Therefore it is necessary to develop from the aspect of the system through the commitment of the village head and the establishment of specific regulations expressly and clearly on LPMD.

**Keywords:** Development of system, LPMD, vulnerability of poor vulnerable population



## PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan Maret 2015 dibandingkan September 2014 naik sebesar 0,06 persen dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 12,34 persen pada Maret 2015. Peningkatan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 4.748,42 ribu jiwa menjadi sebanyak 4.789,12 ribu jiwa pada Maret 2015 atau naik sebesar 40,70 ribu jiwa. Data peningkatan penduduk miskin di Jawa Timur tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. :  
Kondisi Kemiskinan di Jawa Timur  
( 2011 - 2015)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk					
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,22
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan					
Jawa Timur	86,15	86,92	87,27	87,72	87,66
Nasional	87,51	88,34	88,53	89,04	88,78
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)					
Jawa Timur	5.251,45	4.992,75	4.893,01	4.748,42	4.789,12
Nasional	30.018,93	28.594,60	28.553,93	27.727,78	28.592,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Berdasarkan hasil Susenas, pada periode September 2014 - Maret 2015, garis kemiskinan di Jawa Timur meningkat sebesar 5,25 persen atau Rp. 15.226 per kapita perbulan, yaitu dari Rp. 289.945 perkapita perbulan pada September 2014 menjadi Rp.305.171 per kapita perbulan pada Maret 2015.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan

angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Nilai P1 di Jawa Timur menunjukkan peningkatan 0,206 poin atau sebesar 1,857 pada September 2014 menjadi 2,063 pada Maret 2015. Peningkatan nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan (0,034 poin), serta di perdesaan mengalami peningkatan (0,372 poin). Sementara itu, nilai P2 juga mengalami peningkatan 0,071 poin atau menjadi 0,525 pada Maret 2015. Peningkatan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Data tentang kondisi P1 dan P2 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 :  
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Jawa Timur

Uraian	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,996	1,935	2,071	1,857	2,063
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,461	0,439	0,503	0,454	0,525

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Kenaikan harga BBM, tingginya angka inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar memicu munculnya penduduk yang rentan miskin. Akibat adanya kenaikan BBM, tingginya inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah otomatis menyebabkan semua harga komoditi pangan yang menjadi kebutuhan pokok menjadi naik drastis. Penduduk yang semula berada di atas garis kemiskinan akan rentan menjadi miskin dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin jauh melambung. Kenaikan harga BBM jenis premium dan solar yang cukup tinggi sebesar masing - masing 44% pada tahun 2013 serta sebesar 31% dan 36% pada tahun 2014 menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Naiknya inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2013 dan 2014 di angka

8.38 dan 8.36 menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin. Hal ini semakin diperparah lagi dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cukup tajam pada tahun 2013 (kurs U\$ = Rp. 12.250,00), tahun 2014 (kurs U\$ = Rp. 12.550,00), hingga pada tahun 2015 (kurs U\$ = Rp. 13.500,00) membuat beban hidup masyarakat golongan menengah ke bawah semakin berat.

Penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Sementara itu, penduduk rentan miskin merujuk pada mereka yang tidak termasuk miskin tapi sangat rentan untuk jatuh miskin. Kelompok *rentan miskin* ini mudah terpengaruh terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "sangat miskin" misalnya bila terjadi kenaikan BBM, inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Upaya pengentasan keluarga rentan miskin dilakukan salah satunya melalui lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan / Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan

Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, LPM memiliki peranan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Peran LPM yang sangat strategis dalam upaya pengentasan keluarga rentan miskin inilah, maka diperlukan peningkatan kelembagaan LPM agar bisa megoptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui hambatan sistem apakah yang dihadapi oleh LPMD dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya diperlukan pula pengembangan dari aspek sistem bagi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin.

Memegang peran strategis pada proses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, maka diperlukan pengembangan lembaga LPM dalam rangka pengentasan keluarga rentan miskin. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam kajian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa saja hambatan sistem yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menjalankan fungsinya?
2. Bagaimana pengembangan dari aspek sistem bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin?

## TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga kemasyarakatan atau biasa disebut dengan lembaga sosial merupakan salah

satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, namun memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali.

Menurut J.P Gillin (dalam Koentjaraningrat. 2009), ciri-ciri umum lembaga sosial (*General Features of Social Institution*) adalah berikut:

- Lembaga-lembaga sosial yang pola organisasi pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil. Ini terdiri dari kebiasaan, perilaku sistem, dan unsur-unsur budaya lainnya yang tergabung dalam unit fungsional.
- Lembaga sosial juga dicirikan oleh tingkat tertentu permanen. Oleh karena amal adalah seperangkat norma yang berkisar pada kebutuhan dasar, maka sudah sewajarnya bila dipertahankan dan standar.
- Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, serta lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
- Ada peralatan ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, kuil dan biara untuk lembaga-lembaga keagamaan.
- Lembaga sosial biasanya juga ditandai dengan simbol atau simbol tertentu. Simbol seperti simbolis menarik tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
- Lembaga sosial telah menulis dan tradisi tidak tertulis yang menetapkan tujuan, aturan, dan lain-lain. Misalnya, izin untuk menikah dan hukum perkawinan bagi institusi perkawinan.

Secara terminologi, kapasitas berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang berarti tiga hal pertama yakni daya tampung atau daya serap, kedua ruang atau fasilitas yang tersedia, dan terakhir kemampuan maksimal. Pengertian pengembangan kapasitas secara terminologi

masih mengalami perbedaan pendapat, ada beberapa yang merujuk pada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan lain lain ), dan sebagian lain mengartikan dalam konteks yang lebih luas, termasuk didalamnya terdapat sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (Riyadi Soeprapto, 2010).

Brown et.al (2001) mendefinisikan "*Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or system to meet its stated purposes and objectives*". Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa Pengembangan Kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Selain itu menurut Yeremias T. Keban (2008) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Sedangkan menurut Soeprapto (2010) tentang pengertian Pengembangan Kapasitas, yaitu:

1. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
2. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem.
3. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
4. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Menurut Keban (1995) bahwa Pengembangan Kapasitas / *Capacity Building* adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison (2001) mengatakan bahwa "*Learning is a process, which flows from the need to make sense out of experience, reduce the unknown and uncertain dimensions of life and build the competencies required to adapt to change*". Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.

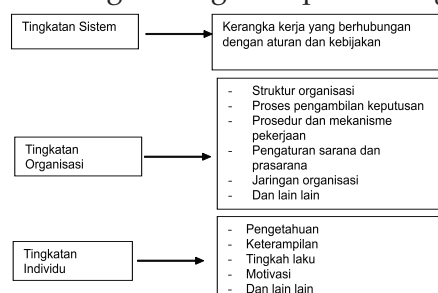
Berdasarkan pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adapun tujuan dari Pengembangan Kapasitas dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Secara umum diidentikkan pada perwujudan *sustainability* (keberlanjutan) suatu sistem.
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
  - a. Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome.
  - b. Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
  - c. Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
  - d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan Soeprapto (2010) yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui bagan berikut:

Bagan 1 :

Tingkatan Pengembangan Kapasitas Organisasi



Dari bagan tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan organisasi seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, seperti keterampilan-keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:

1. Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut
2. Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi
3. Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lain lain.

Penelitian ini fokus pada pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ditinjau dari aspek sistem.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah (Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982). Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah (a) Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alamiah sebagai sumber penelitian dan peneliti adalah instrumen kunci; (b) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah dalam wujud gambaran kata-kata, dan bukannya nomor; (c) Penelitian kualitatif mempunyai kaitan dengan proses bukannya secara sederhana dengan produk atau hasilnya; dan (d) Pendekatan kualitatif lebih mementingkan "makna".

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pamekasan. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

1. Interview : wawancara dengan informan yang dilakukan dengan teknik *deep interview* (wawancara mendalam) dengan menggunakan instrumen berupa pertanyaan terbuka
2. Data sekunder ; informasi yang diambil dari dokumen / catatan resmi dari instansi terkait, maupun dokumen / catatan yang diperoleh dari tempat lain (jurnal, surat kabar, internet, dan lain-lain).
3. Observasi lapangan ; pengamatan terhadap lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian akan dipilih secara *purposive*, artinya individu-individu yang menjadi subyek dijangkau sesuai kebutuhan. Kegiatan menjangkau subyek penelitian diawali dengan observasi di daerah penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi nara sumber adalah :

- a. Bappemas ; terkait pihak penyelenggara program pengentasan masyarakat rentan miskin
- b. Kecamatan ; terkait pihak penanggung

- a. jawab wilayah
- c. Kelurahan / Desa : terkait penanggung jawab wilayah
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa : terkait lembaga pelaksana pemberdayaan masyarakat
- e. Masyarakat : terkait sebagai penerima manfaat program

Keabsahan data (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan, yang didasarkan pada kriteria tertentu, diantaranya yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan ketidakpastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*). Kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Lexy J Moleong (2008) diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Proses triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara berikut : (a). membandingkan apa yang dikatakan seseorang dengan orang lain, (b) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik siklus interaktif dari Miles (1992) yaitu mencakup tiga langkah seperti bagan berikut : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hambatan LPMD Dalam Menjalankan Fungsinya : Aspek Sistem

Untuk mengetahui hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dari aspek system, maka terlebih dahulu dilakukan

analisis terhadap berbagai regulasi / aturan tentang LPMD mulai dari aturan pusat sampai aturan daerah yang menyertainya.

Regulasi pusat tentang LPMD adalah (1). UU No 6 Tahun 2014, PP No 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (3). Permendagri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan (4). Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Analisis hambatan dan pengembangan LPMD dari aspek sistem bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 :  
Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Dalam Menjalankan Fungsinya : Aspek Sistem

No	Kabupaten	Hambatan Sistem
1	Trenggalek	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD
2	Pasuruan	Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.
3	Malang	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD
4	Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi dari pusat tentang LPMD tidak tegas dan jelas</li> <li>▪ Tidak ada regulasi yang jelas dan tegas tentang tugas seksi-seksi dalam organisasi LPM</li> <li>▪ Tidak ada aturan yang jelas mengenai dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD</li> </ul>

Sumber : hasil olah data

## 2. Pengembangan LPMD : Aspek Sistem

Pengembangan LPMD bisa disusun berdasarkan analisis berbagai hambatan yang dialami oleh LPMD dari aspek sistem yang telah dilakukan. Untuk mengoptimalkan peran LPMD dalam kegiatan pembangunan desa sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin, maka pengembangan lembaga dari

aspek sistem harus bisa digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi LPMD. Pengembangan sistem yang bisa dilaksanakan adalah :

Tabel 4 :  
Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) : Aspek Sistem

No	Kabupaten	Hambatan Sistem	Pengembangan Sistem
1	Trenggalek	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD	<p>Kabupaten Trenggalek sudah memiliki Perda sehubungan dengan LPMD (Perda no 10/2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan). Perda tersebut sudah memuat aturan yang jelas tentang LPMD.</p> <p>Pengembangan sistem yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Perda no 10 / 2006 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD</li> <li>▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD.</li> <li>▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 10 / 2006 pasal 54</li> </ul>
2	Pasuruan	Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.	Perlu adanya regulasi daerah / Perda / Perbup yang mengatur tentang LPMD
3	Malang	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD	<p>Kabupaten Malang sudah memiliki Perbup sehubungan dengan LPMD (Perbup Malang No 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Malang). Perbup tersebut sudah memuat secara khusus dan rinci tentang LPMD.</p> <p>Pengembangan sistem yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Perda no 14 / 2012 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD</li> <li>▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD.</li> <li>▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 14 / 2012 pada lampiran Bab VI (Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat diperoleh dari : Swadaya masyarakat; Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan ); Bantuan Pemerintah Kabupaten; Bantuan Pemerintah Provinsi; Bantuan Pemerintah; dan Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat</li> </ul>
4	Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi dari pusat tentang LPMD tidak tegas dan jelas</li> <li>▪ Tidak ada regulasi yang jelas dan tegas tentang tugas seksi-seksi dalam organisasi LPM</li> </ul>	<p>Kabupaten Pamekasan sudah memiliki Perda sehubungan dengan LPMD ( Perda no 6 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Perda tersebut sudah memuat aturan yang jelas tentang LPMD.</p>

No	Kabupaten	Hambatan Sistem	Pengembangan Sistem
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada aturan yang jelas mengenai dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD</li> </ul>	Pengembangan sistem yang dilakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan Perda no 6 / 2004 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD</li> <li>▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD.</li> <li>▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 6 / 2004 pasal 10</li> </ul>

Sumber : hasil olah data

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah LPMD tidak bisa optimal sebagai penggerak pembangunan di desa dikarenakan masih mengalami berbagai hambatan sistem dalam menjalankan fungsinya yaitu :

1. Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD
2. Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.

Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan sistem Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk mengoptimalkan fungsinya dalam pembangunan desa khususnya pengentasan penduduk rentan miskin. Pengembangan sistem tersebut adalah :

1. Komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD
2. Adanya regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.

Sedangkan saran yang diberikan dari hasil penelitian ini pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin adalah pemerintah daerah harus meninjau kembali aturan tentang organisasi LPMD agar menjadi aturan yang tegas dan jelas yang akan dijadikan landasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp, (1982), *Qualitative Research for Education An Introduction to theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon, Inc
- Brown, Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of North Carolina, Chapel Hill
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Keban, T Yeremias, 1995, *Kinerja Organisasi Publik, Bahan Seminar Sehari dalam Rangka Purna Tugas Drs. Sediono*, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Lexy J Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. :Universitas Indonesia Press
- Morrison Terrence, 2001. *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute
- Soeprapto. Riyadi, 2010, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank